



• NUSABALI/DEWA

Pencucian mobil di Kantor Pemkab Bangli yang mubazir, Minggu (17/5).

Aset Pencucian Mobil Milik Pemkab Mubazir

BANGLI, NusaBali

Tempat pencucian mobil milik Pemkab Bangli yang dibangun pada era kepemimpinan mantan Bupati Bangli, I Nengah Arnawa dengan anggaran yang cukup besar, ternyata selama ini mubazir. Pasalnya sejak awal dibangun hingga kini pencucian mobil yang berlokasi di sebelah selatan Kantor Bagian Humas Setda Bangli tersebut, tidak pernah digunakan. Alasannya, lantaran letaknya yang kurang pas sehingga sopir mengalami kesulitan memasuki kendaraan. Selain itu, lokasinya malah di bagian depan kantor SKPd sehingga tentunya pemandangan ini kurang indah untuk dipandang.

Menurut informasi yang dihimpun NusaBali, diketahui semenjak dibangun permandian mobil yang menghabiskan dana puluhan juta itu, sama sekali tidak pernah digunakan. Jangankan digunakan untuk memandikan mobil, malah untuk menaikkan mobil saja pengemudi tidak bisa. Makanya, anggaran daerah tersebut terkesan terbuang percuma. Banyak pegawai selama ini mengusulkan, supaya di sana agar dibangun garasi saja, mengingat mobil dinas di Pemkab Bangli sampai saat ini masih kekuarangan tempat, sehingga banyak mobil yang masih diparkir di tempat terbuka sehingga seperti dijemur di siang hari.

Kabag Umum Setda Bangli Made Mahindra Putra saat dikonfirmasi, tidak menampik bahwa pencucian mobil tersebut selama ini tidak pernah digunakan. Karena lokasinya kurang strategis. "Kendaraan memang sangat sulit untuk dimasukan ke sana," ujarnya, Minggu (17/5) kemarin.

Mengenai tindak lanjutnya, permandian mobil tersebut, jelas dia, untuk penghapusannya masih dalam kajian. Apabila, desain pembangunan Puspem ini sampai di lokasi permandian mobil itu, maka pihaknya mau tidak mau harus melakukan penghapusan terhadap aset daerah tersebut. "Untuk masalah (pencucian mobil) itu kami tengah melakukan kajian," ujarnya. **cr53**

Edisi : Rabu, 20 Mei 2015

Hal : 8



Enam Saksi Beber Pengadaan Lahan di Dermaga Gunaksa

DENPASAR, NusaBali

Tiga terdakwa dalam kasus dugaan korupsi Dermaga Gunaksa Klungkung yang merupakan anggota Tim 9 (panitia pengadaan lahan), yaitu Ketut Janapria (Eks Sekda Klungkung), I Made Ngurah dan AA Sagung Mastini (Eks Kepala BPN Klungkung) kembali menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Selasa (19/5).

Enam saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu I Gusti Ngurah Rai (Eks Sekda Klungkung), Nengah Lanus (Pengukur tanah), Matoha (pengukur tanah BPN), I Wayan Tika (Plt Kadishub Klungkung), Putu Anika Sutawijaya (bendahara) dan I Wayan Pegig Suartama (tokoh masyarakat Gunaksa).

Saksi yang dihadirkan ini juga sama dengan yang dihadirkan dalam sidang anggota Tim 9 yang sebelumnya pada, Senin (18/5) dengan terdakwa I Gusti Ngurah Gede dan I Gusti Gde Wiratmadja dengan majelis hakim pimpinan Cening Budiana. Dan empat terdakwa lain, yaitu Anak Agung Ngurah Agung, I Nyoman

Rahayu, Made Sugiarta dan I Nyoman Sukantra dengan majelis hakim pimpinan Putu

Gde Ariyadi.

Keterangan enam saksi ini juga tidak jauh berbeda dengan

keterangan sebelumnya. Seperti yang dijelaskan Wayan Tika yang saat itu menjabat

Plt Kadishub Klungkung. Ia mengatakan tidak tahu persis dengan penentuan harga tanah untuk Dermaga Gunaksa. Meskipun saat itu Dinas Perhubungan menjadi Pengguna Anggaran (PA).

Namun ia mengatakan menjalankan tugasnya seperti membayar tanah kepada para pemilik tanah yang sudah menyepakati harga tanah Rp 14 juta per are. Saat ditanya JPU apakah saat membayarkan kepada pemilik tanah ia mengecek dokumen kepemilikan tanah dan mencocokkan di lapangan, Tika mengatakan tidak. "Saya hanya memberikan cek kepada pemilik tanah sesuai daftar yang sudah dibuat panitia pengadaan lahan," ujarnya.

Sementara itu, Matoha yang bertugas mengukur lahan yang akan dibebaskan di Gunaksa juga mengatakan sudah melakukan tugasnya mengukur tanah. Meskipun saat itu sempat terjadi kelebihan bidang tanah yang diukur. "Sebelumnya saya ditugaskan mengukur 90 bidang tanah. Tapi di lapangan ternyata bertambah," jelasnya. rez



• NUSABALI/YUDA
TERDAKWA, I Ketut Janapria mantan Sekda Klungkung, Made Ngurah mantan Kepala Bappeda dan AA Sagung Mastini mantan Kepala BPN Klungkung mendengarkan keterangan saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (19/5).